

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat semakin besar, lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan ini dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Dengan demikian lembaga keuangan akan bergerak dalam kegiatan perekonomian dan berbagai pelayanan jasa yang diberikan.

Usaha simpan pinjam dalam menjalankan usahanya ialah menerima dana dari pemerintah daerah dalam bentuk rekening koran dan simpanan dari anggota kemudian menyalurkan dana yang diterimanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Makin besar jumlah uang yang dipercayakan masyarakat pada suatu usaha simpan pinjam, berarti semakin besar pula kepercayaan masyarakat kepada usaha simpan pinjam tersebut .

Pengendalian internal merupakan suatu sistematika yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan atau organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin kebijakan dan tanggung jawab tugas tertentu . Dengan adanya sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian dan

sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan atau organisasi tercapai.

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan dengan baik yaitu perusahaan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan serta pengecekan independen atas pelaksanaan.

Untuk menetapkan sasaran dan tujuan organisasi agar tercapai dengan efektif terdapat lima komponen yang dilakukan dalam pengendalian yaitu pengendalian internal terhadap lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal diharapkan manajemen memiliki kepentingan yang sama dengan auditor dalam mengevaluasi sistem.

Adapun syarat-syarat pengendalian internal yang baik adalah adanya struktur organisasi yang mengadakan pemisahan fungsi pertanggungjawaban secara tepat, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memadai yang memberikan pengawasan yang layak terhadap aktiva, hutang, pendapatan, biaya dan praktek yang sehat yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap organisasi. Tujuan dari adanya sistem pengendalian internal adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang (kredit) yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian internal piutang, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri yaitu merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh suatu kelurahan yang bergerak dalam usaha meminjamkan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Dapat dilihat bahwa permintaan terhadap peminjaman masyarakat yaitu PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana sebagai modal usaha bagi masyarakat, sehingga masyarakat sekitar menjadi produktif.

Dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut memiliki prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat yang akan mengajukan pinjaman. Dijalankannya prosedur ini bertujuan untuk dapat mengendalikan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam proses pemberian kredit perlu dilakukan analisa terhadap pengajuan kredit oleh calon peminjam/pemanfaat.

Secara garis besar prosedur pemberian kredit yang kepada debitur pada PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut adalah sebagai berikut :

Tahap pertama, proses pengajuan proposal kredit dalam pengajuan proposal kredit langkah yang dilakukan oleh calon pemanfaat adalah mengisi formulir proposal yang sudah diberikan oleh UPK yang isinya nama peminjam, alamat, besarnya pinjaman, dan usaha apa yang akan dilakukan oleh peminjam beserta anggotanya, serta melampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan kredit, Kartu Keluarga (KK), Rencana Usaha Anggota (RUA) .

Tahap kedua UPK memeriksa keabsahan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan mulai dari penyelidikan berkas-berkas yang dijadikan jaminan, membuktikan kebenaran dan keaslian berkas yang telah dilampirkan. Apabila terdapat pengisian data atau perlengkapan syarat yang kurang terhadap proposal yang diajukan maka akan diberikan catatan perbaikan dan mengembalikan proposal tersebut kepada UPK.

Tahap ketiga berkas yang telah dianggap memenuhi syarat akan diproses oleh UPK untuk menganalisis kelayakan data-data yang dilampirkan oleh calon pemanfaat.

Tahap keempat ini berkas yang sudah dianggap layak akan ditindak lanjuti untuk dilakukan survey lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian segala keterangan calon pemanfaat dengan berkas-berkas yang dilampirkan dalam surat pemohon kredit dengan cara mewawancarai langsung calon pemanfaat yang ditemui, dan memastikan kebenaran data yang diajukan oleh pemanfaat kredit. seperti memeriksa kelengkapan dokumen administrasi proposal seperti Kartu

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Proposal Usulan Peminjam. Dan menilai usaha yang akan dijalankan seperti lokasi usaha, kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan didalam proposal.

Tahap keenam persetujuan ini diputuskan oleh UPK, apakah permohonan kredit tersebut layak atau tidak diberikan kepada calon peminjam. Setelah diputuskan maka akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Penandatanganan SP2K ini dilakukan secara langsung oleh nasabah. Selanjutnya, UPK akan mempersiapkan berkas-berkas untuk pencairan kredit yang surat perintah bayar kepada bank terkait untuk mencairkan dana yang telah disepakati jumlahnya.

Jumlah kredit yang diberikan oleh PNPM-Mandiri Perkotaan Bengkong Laut tidak terlepas dari masalah resiko kredit bermasalah. Dimana kolektabilitas kredit menurut edaran Bank Indonesia nomor: 29/12/BPPP/2004, ada lima kriteria kolektabilitas kredit yaitu: Kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

TABEL I
PNPM MANDIRI PERKOTAAN BENGKONG LAUT
DAFTAR POSISI KREDIT BERMASALAH
PERIODE (2015-2016)

Kolektibilitas	Jumlah	Penunggakan	Jumlah	Penunggakan
	2015 (Rp)	%	2016 (Rp)	%
I (lancar)	138.333.000	69.8	108.565.000	53.5
II (perhatian khusus)	49.842.000	25.1	56.021.000	27.7
III (kurang lancar)	0	0	16.675.000	8.2
IV (diragukan)	0	0	0	0
V (macet)	10.020.000	5.1	21.600.000	10.6
Jumlah	198.195.000	100	202.861.000	100

Sumber: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri
 Perkotaan Bengkong Laut

Berdasarkan tabel I dapat dilihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh
 PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut 2015 hingga 2016 terdapat beberapa
 kredit bermasalah dalam pengembaliannya pada tahun 2015 kolektibilitas I (0
 bulan) dengan kriteria A yang disebut dengan kredit lancar sebesar
 Rp.138.333.000 dengan persentase penunggakan kredit 69,8 % ditahun 2016
 terjadi penurunan sebesar Rp. 108.565.000 dengan persentase penunggakan kredit
 53,5 %, sedangkan kolektibilitas II (I-3 bulan) dengan kriteria B yang disebut
 dengan kredit dalam perlu perhatian ditahun 2015 sebesar Rp.48.842.000 dengan
 persentase penunggakan kredit 25,1 % ditahun 2016 terjadi peningkatan sebesar
 Rp. 56.021.000 dengan persentase penunggakan kredit 27,7 %, kolektibilitas III
 (3-6 bulan) dengan kriteria C yang disebut dengan kredit kurang lancar ditahun

2015 sebesar 0 dengan persentase 0 % di tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 16.675.000 dengan persentase penunggakan kredit 8,2 %, Kolektibilitas IV (>6 bulan) dengan kriteria D yang disebut dengan kredit diragukan ditahun 2015 tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0 % ditahun 2016 tetap tidak terdapat tunggakan dengan persentase 0 % dan terakhir kolektibilitas V (>9 bulan) dengan kriteria E yang disebut dengan kredit macet ditahun 2015 sebesar Rp. 10.020.000 dengan persentase penunggakan kredit 5,1 % dan ditahun 2016 terjadi peningkatan sebesar Rp. 21.600.000 dengan persentase penunggakan kredit 10,6 %.

Berdasarkan tabel kolektibilitas dapat diketahui bahwa persentase kredit lancar menurun dan terjadi peningkatan terhadap kredit bermasalah terutama kredit macet. Peningkatan kredit bermasalah dan penurunan kredit lancar terjadi akibat aktivitas pengendalian kredit yang kurang maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan analisis dengan judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PNPM MANDIRI PERKOTAAN BENGKONG LAUT KELURAHAN BENGKONG KOTA BATAM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, Maka yang menjadi permasalahan pokok dalam Penelitian ini sebagai berikut :

“Bagaimana efektifitas penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit Pada PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong Kota Batam”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal dalam penyaluran kredit pada PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong Kota .

2. Manfaat Penelitian:

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya tentang pengendalian internal penyaluran kredit pada PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong Kota Batam .
- b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pihak PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong Kota Batam dalam menciptakan pengendalian internal yang baik terhadap penyaluran kredit yang dapat diberikan secara efektif.
- c) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran baru dan sumber bahan informasi untuk para peneliti yang ingin melakukan terhadap masalah yang sama dimasa akan mendatang.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka dan Hipotesis

Mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan serta hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan/Organisasi

Menjelaskan tentang sejarah singkat PNPM Mandiri Perkotaan Bengkong Laut Kelurahan Bengkong Kota Batam, Struktur organisasi dan aktivitas lembaga.

BAB V : Hasil dan Pembahasan Penelitian

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : Penutup

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau